

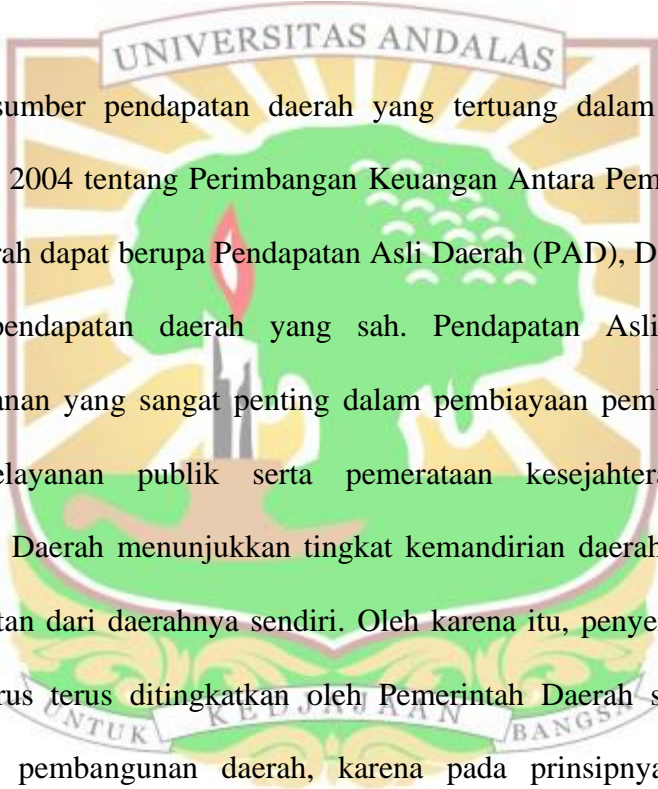
BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perubahan kepemimpinan di Indonesia membawa dampak berubahnya sistem pemerintahan mulai dari pemerintah pusat sampai kepada pemerintah daerah. Sistem pemerintahan daerah yang saat ini dikenal dengan nama otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dijelaskan pada Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Otonomi daerah membawa perubahan pada sistem pemerintahan yang dulunya sentralisasi menjadi sistem desentralisasi. Pada sistem sentralisasi segala urusan pusat dan daerah diatur oleh pemerintah pusat, sementara pada sistem desentralisasi urusan daerah diatur oleh pemerintah daerah. Pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengatur urusan daerah serta membangun daerah berdasarkan potensi dan kondisi wilayahnya. Tujuan sistem Desentralisasi yaitu untuk meningkatkan partisipasi pemerintah daerah dan masyarakat untuk membangun daerahnya melalui potensi daerahnya sendiri, selain itu juga untuk memacu kemandirian daerah dalam membangun daerahnya dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki. Dalam pelaksanaan otonomi daerah diharapkan terciptanya keadilan antar daerah untuk itu dibutuhkan peran dari pemerintah pusat. Hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah diwujudkan dengan adanya dana perimbangan yang diberikan oleh pemerintah pusat

kepada daerah seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dengan adanya dana perimbangan dari pemerintah pusat ini digunakan untuk pemerataan agar tidak terjadi ketimpangan fiskal antar daerah, sementara untuk pelaksanaan pemerintahan di daerah diharapkan pemerintah daerah dapat menggali potensi dan sumber-sumber pendapatan dari daerahnya sendiri sesuai prinsip desentralisasi.



Sumber-sumber pendapatan daerah yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dapat berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) mempunyai peranan yang sangat penting dalam pembiayaan pembangunan daerah, peningkatan pelayanan publik serta pemerataan kesejahteraan masyarakat. Pendapatan Asli Daerah menunjukkan tingkat kemandirian daerah dalam menggali potensi pendapatan dari daerahnya sendiri. Oleh karena itu, penyerapan Pendapatan Asli Daerah harus terus ditingkatkan oleh Pemerintah Daerah sebagai penopang utama kegiatan pembangunan daerah, karena pada prinsipnya semakin besar Pendapatan Asli Daerah maka semakin kecil pula ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat. Kemampuan daerah dalam mengelola keuangan daerah tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintah, pembangunan daerah, dan pelayanan sosial masyarakat. Untuk itu diperlukan evaluasi terhadap pengelolaan keuangan daerah untuk menilai kinerja pemerintah

daerah dalam pengelolaan keuangan daerah tersebut. Salah satu alat yang dapat digunakan untuk menganalisis kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya adalah dengan menggunakan rasio-rasio keuangan terhadap APBD (Halim, 2012).

Daerah-daerah di seluruh Indonesia termasuk Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Jambi terus berusaha untuk meningkatkan pendapatan daerahnya sebagai bagian dari pembangunan di daerah. Dengan diberlakukannya otonomi daerah oleh Pemerintah Pusat maka Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Jambi diberikan kewenangan dalam mengatur urusan daerahnya sendiri. Pelaksanaan desentralisasi sangat tergantung dengan potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah. Provinsi Sumatera Barat memiliki kawasan yang sebagian besar masih ditutupi hutan lindung, sehingga pemerintah Provinsi Sumatera Barat dapat memaksimalkan pendapatan daerahnya melalui sektor pariwisata. Sementara Provinsi Jambi dapat memaksimalkan pendapatan daerahnya di bidang pertambangan, pertanian/perkebunan dan kehutanan. Perbedaan kemampuan antar daerah dapat menyebabkan ketimpangan antar satu daerah dengan daerah lainnya. Oleh karena itu, dengan perbedaan kemampuan antar daerah tersebut, pemerintah pusat berusaha untuk menciptakan keadilan dan pemerataan dengan memberikan dana perimbangan, tujuannya agar tidak terjadi ketimpangan antar daerah. Namun, pemerintah daerah harus tetap berupaya menggali potensi daerahnya semaksimal mungkin dalam pelaksanaan otonomi daerah agar tidak tergantung dengan dana perimbangan yang diberikan oleh pemerintah pusat. Pemerintah daerah juga harus bertanggung jawab

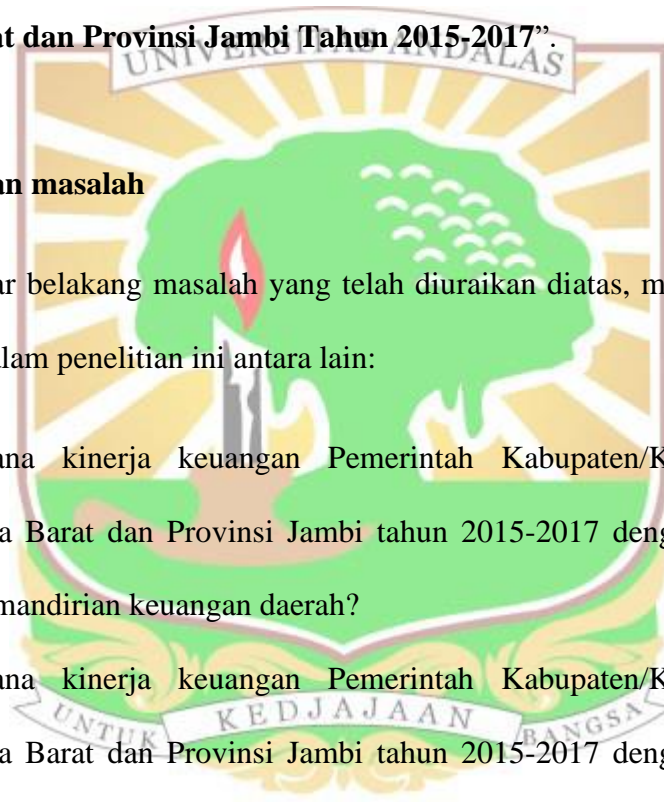
dalam pengelolaan keuangan daerahnya yang digunakan dalam pelaksanaan otonomi daerah. Untuk itu diperlukan sebuah indikator untuk mengukur kinerja pemerintah daerah dalam melaksanakan otonomi daerah dan indikator untuk mengetahui tingkat kemampuan daerah untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah tersebut.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini mengambil judul “**Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Jambi Tahun 2015-2017**”.

1.2 Rumusan masalah

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini antara lain:

1. Bagaimana kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Jambi tahun 2015-2017 dengan menggunakan rasio kemandirian keuangan daerah?
2. Bagaimana kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Jambi tahun 2015-2017 dengan menggunakan rasio efektivitas penerimaan pendapatan asli daerah?
3. Bagaimana kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Jambi tahun 2015-2017 dengan menggunakan rasio pertumbuhan pendapatan asli daerah?



1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Jambi tahun 2015-2017 dengan menggunakan rasio kemandirian keuangan daerah.
2. Untuk mengetahui kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Jambi tahun 2015-2017 dengan menggunakan rasio efektivitas penerimaan pendapatan asli daerah.
3. Untuk mengetahui kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Jambi tahun 2015-2017 dengan menggunakan rasio pertumbuhan pendapatan asli daerah.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak, terutama bagi pihak-pihak berikut ini:

1. Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menambah pengetahuan peneliti, juga sebagai praktik atau sarana untuk menerapkan teori-teori yang sebelumnya telah didapat selama di bangku perkuliahan.
2. Bagi Instansi Pemerintahan, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran dan masukan bagi Pemerintah Daerah khususnya Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Jambi dalam mengelola keuangan daerah.

3. Bagi Pihak lain, diharapkan penelitian ini dapat memberi gambaran dan pemahaman yang jelas mengenai kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Jambi tahun 2015-2017 serta dapat digunakan sebagai informasi untuk pengembangan pada peneliti selanjutnya.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian ini dibagi dalam lima bab yang terdiri dari:

- a. Bab I, berisi tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penulisan
- b. Bab II, berisi tentang Teori Otonomi Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Sumber Pendapatan Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, Indikator Kinerja Keuangan, Penelitian Terdahulu dan Kerangka Berpikir.
- c. Bab III, berisi tentang Desain Penelitian, Populasi dan Sampel Penelitian, Jenis dan Sumber Data, Metode Pengumpulan Data, Variabel Penelitian dan Metode Analisis Data.
- d. Bab IV, berisi tentang Gambaran Umum dan Hasil Penelitian dan Pembahasan.
- e. Bab V, bagian penutup yang berisi Kesimpulan Penelitian, Keterbatasan Penelitian, dan Saran.